KELEMBAGAAN DAERAH - SEKRETARIAT DAERAH - TUGAS DAN FUNGSI - PERUBAHAN 2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 22, BD 2025/NO. 22, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan. Peraturan Bupati ini mengatur perubahan tugas, fungsi, dan penataan ruang lingkup koordinasi Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas guna menyesuaikan pemekaran dan perubahan nomenklatur perangkat daerah baru.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
  1. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) mengenai penyesuaian ruang lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi meliputi 15 instansi/perangkat daerah: (1) Setwan DPRD; (2) Disdikbud; (3) Dinkes; (4) DP3AP2KB; (5) Disdukcapil; (6) Disparpora; (7) Disnakertrans; (8) Dispersip; (9) Dinsos; (10) DPMD; (11) Satpol PP; (12) BPBD; (13) Bakesbangpol; (14) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD); dan (15) Kecamatan se-Kabupaten Sambas.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (2) mengenai penyesuaian ruang lingkup koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi meliputi 9 instansi/perangkat daerah: (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; (3) Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan; (4) DPMPTSP; (5) DPUPR; (6) Disperkim-LH; (7) Dishub; (8) Diskominfo; dan (9) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Mei 2025.

- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 77).